

SUAR *insight*
SPOTLIGHT

Solusi Gerakkan Ekonomi via Properti

Menggairahkan Perekonomian dari Sektor Perumahan



Daftar Isi

Sampul	1
Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif: Solusi Gerakkan Ekonomi via Properti	3
Menggairahkan Perekonomian dari Sektor Perumahan	5
Merawat Industri Properti	14
Gaya Jual Rumah ke Generasi Z	19



Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, mengikuti pertemuan kolaborasi pemutakhiran dan dashboard DTSEN dalam program FLPP dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tiga juta rumah di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Ringkasan Eksekutif:

Solusi Gerakkan Ekonomi via Properti

Program ini juga merupakan janji kampanye Presiden Prabowo, yang ditargetkan akan dicapai dalam satu periode pemerintahan atau lima tahun.

Penulis: **Mukhlison Widodo**

Demi memberikan rumah layak huni kepada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah melalui Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif utama yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ini juga merupakan janji kampanye Presiden Prabowo, yang ditargetkan akan dicapai dalam satu periode pemerintahan atau lima tahun.

Program insentif rumah subsidi dan rumah murah merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk:

- Mengatasi backlog perumahan nasional
- Memberikan akses hunian layak bagi MBR
- Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial
- Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti dan konstruksi

Agar bisa mencapai pembangunan rumah hingga 3 juta unit selama 5 tahun, ada beberapa insentif yang ditawarkan pemerintah. Beberapa antaranya:

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%

Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah subsidi dengan harga maksimal Rp2 miliar sehingga meringankan beban pembeli rumah pertama

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Skema pembiayaan rumah subsidi dengan bunga tetap maksimal 5%, tenor hingga 20 tahun, target MBR dengan penghasilan maksimal Rp14 juta/bulan dan disalurkan melalui bank seperti BRI, BTN, dan lainnya.

BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Program bedah rumah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni melalui metode Padat Karya Tunai (PKT), untuk memberikan dana dan tenaga kerja lokal serta meningkatkan kualitas hunian dan daya beli masyarakat

Gen Z dan insentif perumahan

Generasi angkatan kerja paling muda saat ini, Generasi Z (Gen Z) adalah kelompok umur yang paling banyak memanfaatkan insentif pemerintah dalam program kepemilikan rumah.

- Gen Z kini mendominasi pembelian rumah subsidi sepanjang tahun 2024. Total unit yang dibeli mencapai 124.889 unit.
- Tergolong masyarakat berpenghasilan tanggung atau MBT, yang justru tidak mendapat dukungan memadai dari fasilitas yang dirilis Pemerintah.
- Solusi yang paling realistis terkait hunian buat Gen Z adalah hunian vertikal dengan subsidi parsial.



Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di kawasan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025). Pemerintah menargetkan penerbitan regulasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perumahan pada akhir Juli yang akan didukung pembiayaan sebesar Rp130 triliun dari Danantara, guna mencapai target pembangunan program 3 juta rumah. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Menggairahkan Perekonomian dari Sektor Perumahan

Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat. Kolaborasi antar lembaga negara, perbankan dan pengembang swasta. Masalah backlog lahan perlu perhatian.

Penulis: **Mukhlison, Harits Arrazie, dan Ridho Syukra**

Mengenakan batik bernuansa warna biru, Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman Wilayah, Maruarar Sirait, berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 30 Juli 2025. Hari itu, ia melapor ke Presiden terkait perkembangan terakhir program pembangunan perumahan bersubsidi untuk masyarakat. Juga sejumlah program strategis bidang perumahan,

termasuk rencana peluncuran rumah subsidi secara masif dan terobosan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

“Yang pertama tadi saya laporkan bahwa kami membuat acara di bulan September, yaitu acara launching rumah subsidi. Rencananya secara masif di bulan September,” ujar Maruarar usai pertemuan itu.



Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. (BPMI Setpres)

Program rumah subsidi akan diluncurkan serentak di berbagai kota dengan target awal minimal 25.000 unit. Peningkatan kuota subsidi dari 200.000 menjadi 350.000 unit tahun ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam menjawab kebutuhan perumahan rakyat. “Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200.000-an, tahun ini ada 350.000,” ucapnya.

Maruarar menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci

keberhasilan peningkatan program ini. Rumah subsidi diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media.

“Dan pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20.000 (unit), buat nelayan 20.000 (unit), buat juga buruh 20.000 (unit). Kemudian juga buat teman-teman media 3.000 (unit), buat supir sementara ini sudah dialokasikan 8.000 (unit), kemudian buat guru juga 20.000 (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” jelasnya.

“

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan untuk pertama kalinya di Indonesia

”

“Ini pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Baru pertama kali Presiden Prabowo, dukungan dari Danantara, dari BUMN, dikoordinir oleh Bapak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, dan

Ibu Sri Mulyani. Jadi dari segi supply, itu ada support nanti buat developer, buat kontraktor, itu bisa dengan jumlah yang signifikan,” terang Maruarar.

Proyek strategis 3 juta rumah

Demi memberikan rumah layak huni kepada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah melalui Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif utama yang

diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga merupakan janji kampanye Presiden Prabowo, yang ditargetkan akan dicapai dalam satu periode pemerintahan atau lima tahun.



Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di salah satu perumahan di Kecamatan Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (13/7/2025). Pemerintah Kota Kendari mencatat 4.029 unit rumah bersubsidi periode Januari hingga 9 Juli 2025 telah mengantongi izin persetujuan bangunan gedung (PBG) guna mempercepat realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah

Program ini bertujuan untuk membangun dua juta rumah di pedesaan juga wilayah pesisir dan satu juta rumah di perkotaan. Juga untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak. Selain itu, secara tidak langsung bisa mengurangi angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta mengentaskan masalah perumahan

dan permukiman secara umum dan menggairahkan perekonomian nasional.

Pihak Istana, melalui Satuan Tugas Presiden, pernah menyebut anggaran negara yang diperlukan untuk merealisasikan program ini mencapai Rp53,6 triliun.

Namun, hingga kini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya diberi anggaran sebesar Rp5,27 triliun. Bahkan, jumlah anggaran ini hanya berlaku untuk tahun 2025, belum untuk tahun 2026, 2027, dan seterusnya yang sudah pasti memerlukan biaya lebih besar untuk pembangunan.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengungkapkan tantangan kementerian dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah adalah pembiayaan. Menurutnya, negara hanya bisa membangun dan merenovasi 269.779 unit hunian.

Angka tersebut berdasar nilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sudah dijadikan

daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). “Kemampuan kita tidak sampai 270.000 (rumah). Dari APBN dan dari FLPP,” ujar Maruarar dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, 19 Mei 2025.

Saat ini, pagu anggaran Kementerian PKP setelah efisiensi sebesar Rp3,446 triliun. Dalam presentasi peta jalan Program 3 Juta Rumah, Maruarar memerinci, pembangunan rumah susun sebanyak 2.682 unit, pembangunan rumah khusus 476 unit, revitalisasi rusun 6.687 unit, Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya atau BSPS 38.504 unit, penanganan kawasan kumuh 1.430 unit, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit.



Warga menyiapkan roti dagangannya di Rumah Susun Bidara Cina, Jakarta, Senin (28/7/2025). Kementerian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh dan pembangunan hunian vertikal baik berupa sewa maupun milik. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

Dengan demikian, Maruarar menyebut pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Kementerian PKP adalah target 3 juta rumah dikurangi 269.799 rumah. Untuk itu, ia bekerja sama dengan berbagai pihak,

termasuk Kementerian Keuangan dan perusahaan swasta untuk mendapat dukungan pembiayaan. Salah satunya hasilnya adalah program FLPP akan ada penambahan kuota dari 220.000 menjadi 350.000 unit.

Mengejar target dengan **insentif**

Agar bisa mencapai pembangunan rumah hingga 3 juta unit selama tahun, ada beberapa insentif yang ditawarkan pemerintah. Pertama, pemerintah telah memperpanjang insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir tahun 2025.

Insentif ini berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal dua miliar rupiah. Artinya, masyarakat yang membeli rumah dalam kategori tersebut tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk rumah dengan harga antara dua miliar hingga lima miliar rupiah, PPN hanya dikenakan atas selisih harga di atas dua miliar rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan menggairahkan sektor properti nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga Desember 2025 dan tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Insentif PPN DTP perumahan 100 persen, kami sudah menyetujui. Sekarang ini sedang dalam proses untuk perubahan PMK-nya diperpanjang sampai dengan Desember,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Senin 28 Juli 2025.

Aturan insentif itu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, di mana besaran insentif PPN

DTP ditetapkan bergantung pada waktu penyerahan unit hunian.

Untuk penyerahan unit pada 1 Januari–30 Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN untuk dasar pengenaan pajak (DPP) Rp2 miliar. Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli–31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50% dari DPP Rp2 miliar.

Kini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025 untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk pembelian rumah. Kebijakan itu juga bertujuan menjaga laju pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi (rakor) pertumbuhan ekonomi bersama kementerian teknis terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 lalu. “Ini semuanya diharapkan memberikan suatu sinyal bahwa kita menggunakan seluruh instrumen yang kita miliki di dalam fiskal untuk mendorong perekonomian kita,” kata Sri Mulyani.

Selain uang pangkal yang disubsidi, insentif lain yang juga dimaksudkan untuk meningkatkan kuota rumah subsidi adalah melalui skema FLPP. Tahun ini, kuota ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, dengan dukungan dana sebesar Rp35,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan, realisasi penyaluran rumah subsidi lewat skema FLPP telah mencapai Rp15,73 triliun hingga Juli 2025. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan,

penyaluran FLPP oleh BP Tapera realisasinya mencapai dengan Rp15,73 triliun itu untuk 126.032 unit rumah hingga Juli 2025. Di mana, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan penyaluran terbesar.



Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (tengah), Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setyawan (kiri) dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho (kanan) menunjukkan dokumen usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (23/7/2025). Melalui kerja sama tersebut BNI diberikan kepercayaan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 25.000 unit pada tahun 2025 dalam rangka menyukseskan program tiga juta rumah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Selain melalui BP Tapera, juga ada kerja sama antara Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan BPJS ketenagakerjaan, dengan meluncurkan program uang muka nol persen untuk rumah subsidi FLPP. Dalam skema ini, uang muka ditanggung oleh pengembang, sehingga konsumen tidak perlu membayar uang muka. Ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama

ini kesulitan memenuhi syarat uang muka dalam pembelian rumah.

Insentif berikutnya, pemerintah memberikan insentif tambahan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi, serta mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia.

Kredit usaha sektor perumahan

Yang terbaru, dan akan digulirkan pada September nanti, adalah rencana pengguliran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dengan nilai mencapai Rp130 triliun. Saat ini, Pemerintah sedang merampungkan regulasi program KUR untuk usaha berskala kecil dan menengah yang bergerak di sektor pengembangan perumahan.

Anggaran program ini dipastikan tidak akan memotong plafon KUR khusus UMKM yang sudah berjalan, karena program ini akan di-back up langsung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Yang berkomitmen mengkolontorkan Rp130 triliun melalui pembiayaan KUR bidang perumahan.

Skema penyaluran KUR Perumahan nantinya berjalan dalam dua jalur. Yakni pertama dari sisi penawaran perumahan, terhubung dengan para pengembang serta ekosistem perumahan guna menghasilkan rumah yang berkualitas serta layak huni, dengan plafon anggaran mencapai Rp177 triliun.

Sisi sebaliknya adalah sisi permintaan dengan anggaran Rp13 triliun yang akan terhubung dengan masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di sektor perumahan, seperti membangun ruko maupun homestay sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan dana KUR Perumahan yang menjadi bagian dalam subsidi pembiayaan perumahan harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu ada sejumlah indikator yang harus di capai yakni tepat sasaran, NPL rendah dan mendorong agar UMKM bisa naik kelas,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choirul, dikutip dari Situs kementerian Perumahan dan Permukiman Wilayah.

Kementerian PKP, imbuhnya, juga akan terus membuka kesempatan bagi mitra kerja untuk memberikan masukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) dengan asosiasi pengembang, agar KUR Perumahan ini mendapat dukungan dari semua pihak, dan dilaksanakan sesuai tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku.

Untuk penyalur KUR Perumahan masih tetap melibatkan bank BUMN atau Himbara yang telah bergerak sebagai penyalur KUR, seperti Bank BRI maupun pembiayaan perumahan yakni BTN. “Kami juga sedang membahas untuk melibatkan Nobu Bank, BCA, dan Artha Graha sebagai penyalur KUR Perumahan serta melakukan FGD untuk mencari masukan dan saran dari pelaku pembangunan dan asosiasi pengembang perumahan,” jelas Didyk.

Peran vital **perbankan** dalam pembiayaan

Sejumlah perbankan juga terlibat dalam percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah subsidi dengan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini.

Salah satu bank penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan pencapaian positif dalam penyaluran kredit KPR bersubsidi. BRI tercatat telah menjangkau 97.878 penerima manfaat di seluruh Indonesia per Juni 2025, naik 18% dari tahun sebelumnya. Nilai outstanding yang ada pun mencapai Rp13,35 triliun, tumbuh 19,51% secara tahunan (YoY).

Capaian ini turut diimbangi oleh kualitas kredit yang tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berada di level rendah, yakni 1,1%.

KPR FLPP juga menjadi skema dengan kontribusi terbesar. Yakni, mencapai 97% dari total penyaluran KPR Bersubsidi BRI hingga pertengahan 2025.

Sedangkan PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga telah menyalurkan pembiayaan untuk KPR Sejahtera FLPP sebanyak 79.104 unit hingga akhir Mei 2025. Tahun ini BTN menargetkan mendukung pemerintah dalam Program Rumah Rakyat dengan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 220.000 unit.

Adapun PT Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat, per 23 Juli 2025, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar. Tahun ini, BNI mendapatkan kuota untuk menyalurkan KPR FLPP sebanyak 25.000 unit.

Jumlah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding dengan kuota awal BNI tahun ini yang hanya sebesar 10.750 unit. Penyaluran ini menjadi bagian dari komitmen BNI dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.

Pengawasan distribusi perumahan

Meski sudah banyak keterlibatan dari bebragai institusi, proram ini juga masih akan menemui banyak hambatan di masa depan. Jumlah tanah atau lahan kosong untuk membangun hunian semakin sedikit dikarenakan penguasaan tanah yang terlalu terpusat oleh beberapa pihak. Hal ini mengakibatkan ongkos tanah yang semakin meninggi untuk program 3 Juta Rumah. Padahal, seharusnya pembangunan rumah dibuat seterjangkau mungkin untuk

masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam lingkup pemerintahan, masalah perumahan dikelola oleh enam kementerian atau lembaga. Hal ini menyebabkan lambatnya proses administrasi dan koordinasi antar pihak terkait pengelolaan sektor perumahan. Jika birokrasi tidak kunjung disederhanakan, maka program 3 Juta Rumah akan sulit untuk dijalankan.

Terakhir, distribusi tiga juta rumah yang telah dibangun perlu diawasi agar sampai ke sasaran yang tepat, yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak dibarengi dengan

pengawasan ketat, program ini berpotensi disalahgunakan sehingga menyasar ke oknum-oknum di luar target sasaran.

“

Jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, program ini berpotensi disalahgunakan sehingga menyasar ke oknum-oknum di luar target sasaran.

”

Apabila ini terjadi, maka program tidak dapat dikatakan berhasil karena kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian belum terpenuhi.

Pengamat properti yang juga menjabat sebagai Head of Research Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) Indonesia, Anton Sitorus, mengatakan, salah satu yang perlu jadi fokus pemerintah saat ini agar Program 3 Juta Rumah ini berjalan baik adalah memastikan semua paket kebijakan insentif tersebut sudah bergerak dan berdampak, tidak jalan di tempat.

Jika salah satu paket insentif tersebut gagal, maka program 3 juta unit rumah ini akan susah dicapai dan akan menjadi wacana semata. Karenanya, ia menilai lebih baik pemerintah fokus pada implementasi insentif yang sudah ada, bukan menambah kebijakan insentif yang baru.

“Kalau saya ditanya mengenai program 3 juta unit rumah ini tidak ada masalah, tujuannya sangat mulia, saya hanya ingin paket insentif tersebut benar-benar jalan dan tidak ada kendala,” ujar dia ketika dihubungi SUAR pada 1 Agustus 2025.

Anton menuturkan, belajar dari kesalahan tahun lalu. Saat itu pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah, namun pada kenyataannya

pembangunan hanya mencapai 300.000 unit atau 30% dari target.

Sama halnya dengan program 3 juta unit rumah ini, secara ide sangat bagus: membantu masyarakat agar mendapatkan hunian layak. Namun, secara realita mungkin perlu kerja keras untuk mencapainya. Kuncinya terletak pada implementasi paket insentif yang sesuai rencana.

Anton menyoroti soal skema FLPP yang masuk ke dalam paket insentif agar lebih diprioritaskan. Sebab, skema FLPP ini juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. “Pemerintah fokus pada pengembangan program FLPP, karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi, terutama yang berpenghasilan rendah,” ungkap dia.

Di sisi lain, patokan rumah subsidi harus berdasarkan World Health Organization (WHO) yaitu minimal 7,2 meter persegi per jiwa dan Standar Nasional Indonesia dengan luasan 9 meter persegi per jiwa. Pemerintah juga harus memperhatikan kenyamanan penghuni karena kenyamanan akan mempengaruhi indeks kebahagiaan seseorang dalam menjalankan kehidupannya.



Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Mekarajadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (7/7/2025). Pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru yaitu renovasi rumah pribadi dengan menyiapkan total plafon Rp13 triliun dan memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Merawat Industri Properti

Sektor properti jadi salah satu penggerak ekonomi utama. Jadi andalan dalam menyerap tenaga kerja dan terhubung ke-185 sektor industri lainnya.

Penulis: **Mukhlison Widodo**

Pasca pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan melakukan kajian terkait insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat sembari mendorong gairah perekonomian. Sebuah tim lalu membuat analisis, dan memilih salah satu sektor yang paling punya dampak pada pertumbuhan ekonomi jika dirangsang dengan insentif yang tepat. Yaitu, sektor perumahan karena memiliki multiplier effect besar.

“Waktu itu kita mencari-cari, cara apa saja yang bisa meredam dampak pelemahan ekonomi dan menjaga pertumbuhan di sekitar 5%,” cerita Immanuel Bekti, Analisis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, yang kini berganti menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), dalam sebuah diskusi pertengahan tahun lalu.

Kini, insentif yang sama juga kemudian diberlakukan di saat perekonomian global mengalami ketidakpastian. Sektor perumahan mendapatkan insentif yang dinamakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah

(DTP). Kementerian Keuangan menyimpulkan saat itu, pengenaan insentif ini dengan menanggung PPN hingga 100% setidaknya bisa menyumbang 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).



Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kedua kanan) didampingi istri Shinta Triastuti (kanan), Direktur Utama Perumnas Tambok Setyawati (kelima kiri) dan Kepala BP Tapera Heru Pudyo Nugroho (kedua kiri) meninjau lahan pembangunan rumah saat acara kunjungan kerja ke lahan Perumnas di Jakarta, Sabtu (5/7/2025). Peninjauan Menteri PKP di lokasi tersebut untuk mengevaluasi program pembangunan perumahan yang sedang berjalan agar berjalan efektif, transparan, serta tepat sasaran. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa

Menurut Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu, kebijakan PPN DTP tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli rumah, tapi juga mendorong pertumbuhan sektor konstruksi.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor konstruksi mencatat pertumbuhan di atas 7% sepanjang tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 7,59% pada triwulan I dan 7,29% pada triwulan II (year on year).

Dorong penyerapan rumah dengan PPN DTP

Sebelumnya, insentif bebas pajak yang ditanggung pemerintah ini sudah berjalan selama dua periode. Periode pertama, PPN DTP sebesar 100 persen diberlakukan Januari sampai Juni 2024, lalu untuk Juli–Desember 2024 diberikan 50 persen. PPN DTP untuk rumah siap huni diumumkan pada November 2023, serta ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan pada 12 Februari 2024.

Pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp5

miliar, dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Selama Januari–Juni 2024, insentif PPN DTP 100 persen dinilai telah mendorong serapan rumah rata-rata Rp160 miliar–Rp170 miliar per bulan. Namun, sewaktu besaran PPN DTP diturunkan menjadi 50 persen pada Juli–Agustus 2024, serapan rumah komersial mengalami perlambatan. Realisasi penyerapan rumah komersial itu turun 33% menjadi rata-rata Rp 100 miliar per bulan.

“

Namun, sewaktu besaran PPN DTP diturunkan menjadi 50 persen pada Juli–Agustus 2024, serapan rumah komersial mengalami perlambatan.

”

Insentif PPN DTP paling banyak diserap untuk rumah komersial dengan harga kurang dari Rp1 miliar per unit, yakni berkontribusi sekitar 70%. Perpanjangan insentif PPN DTP sebesar 100 persen diyakini mampu mendorong kembali pasar perumahan, khususnya dengan harga di bawah Rp1 miliar.

Sebelumnya, insentif PPN atas rumah tapak dan satuan rumah susun

pernah digulirkan pemerintah pada 2021–2022. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021 yang memberikan PPN DTP sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP 50 persen untuk harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Sektor properti kudu diprioritaskan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, sektor properti sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi perlu diprioritaskan, karena setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56%

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sektor ini juga memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sehingga membawa dampak besar bagi bergeraknya perekonomian,” ungkapnya.



Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (tengah) memberikan keterangan pers usai mengikuti pertemuan kolaborasi pemutakhiran dan dashboard DTSEN dalam program FLPP dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tiga juta rumah di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti persiapan Kementerian PKP dan BPS untuk melakukan penilaian secara objektif guna membangun dan merenovasi tiga juta rumah. ANTARA FOTO/Fauzan

Tak hanya itu, Joko menyampaikan, sektor perumahan juga telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Di antaranya, kontribusi produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14%, berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9%, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35%–55%, hingga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14 juta–17 juta orang.

“Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8%, serta menekan stunting, seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto,” tutur dia. Joko menambahkan, sektor

perumahan bisa membuka ketersediaan lapangan pekerjaan hingga 9 juta. Selain itu, bisa menumbuhkan setidaknya 400.000 pelaku industri baru di seluruh Indonesia.

Meningkatnya permintaan masyarakat akan perumahan menjadikan sektor perumahan sebagai mesin utama penggerak perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sektor perumahan menempati posisi penting. Sektor ini merupakan sektor strategis seperti sektor lain yakni pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Pertumbuhan sektor perumahan memiliki peluang besar untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor perumahan memiliki kemampuan untuk mendorong sektor lain supaya dapat lebih berkembang (backward and forward linkage).

Salah satu faktor yang membuat sektor perumahan mampu menyokong pertumbuhan perekonomian adalah karena sektor

perumahan merupakan industri padat modal dan padat karya, serta 90% sumber daya pembangunan perumahan juga berasal dari dalam negeri.

Sektor perumahan yang fokus di bidang pembangunan perumahan merupakan salah satu sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sekitar 50.000 pekerja akan terserap untuk setiap 100.000 pembangunan rumah.

Skema **KPR** paling banyak

Dengan berbagai kebijakan ini, memang dampak dari sisi ekonomi masih belum signifikan. Seperti ditunjukkan dari Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan I-2025 turun.

Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 1,07% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2024 sebesar 1,39% (yoy).

“

Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 1,07% (yoy)

”

“Perkembangan harga properti tersebut dipengaruhi oleh penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan I-2025 yang meningkat, terutama rumah tipe kecil, di tengah penurunan penjualan rumah tipe menengah dan besar,” ujar Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso.

Pada kuartal I-2025, penjualan rumah tipe kecil melesat 21,75% yoy. Namun, penjualan rumah tipe menengah dan besar anjlok masing-masing 35,76% yoy dan 11,69% yoy. Secara keseluruhan, penjualan properti residensial tercatat tumbuh sebesar 0,73 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 15,09 persen (yoy).

Sementara dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal pengembang, dengan pangsa mencapai 77,28%.

“Dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar 70,68% dari total pembiayaan,” ujarnya.



Gaya Jual Rumah ke Generasi Z

Generasi Z paling banyak memanfaatkan fasilitas insentif kredit perumahan berubsidi dari Pemerintah. Perlu evakuasi terkait target program 3 juta rumah.

Penulis: **Mukhlison, Harits Arrazie, dan Ridho Syukra**

Sejak SMA, Leonardo Juan, 27 tahun, sudah terbiasa hidup nomaden, berpindah kamar indekos di berbagai kota. Pengalaman itu mengikis kelekatan emosional pada konsep rumah pribadi.

Bagi Juan, tempat tinggal adalah fungsi, bukan simbol status. Selama atapnya aman dan biayanya masuk akal, bentuk kepemilikannya bisa dinegosiasi.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, situasi itu makin menguatkan pandangan Juan. Penghasilan keluarga menurun drastis, memaksa orang tuanya menjual rumah agar dapur tetap ngebul. “Kami bertahan tanpa aset rumah dua tahun ini, ternyata aman-aman saja,” katanya.

Peristiwa itu semakin meyakinkannya kalau kepastian finansial jauh lebih penting saat ini ketimbang kepemilikan tempat tinggal permanen. Sebagai seorang pekerja kreatif, Juan memang bisa bekerja secara remote. Ia kini tinggal berbagi kamar kos bersama adiknya di Bandung. Sekalian meringankan biaya kos adiknya.

Soal masa depan untuk punya rumah sendiri, ia kerap membandingkan gajinya dengan harga properti di pinggiran Jakarta. Rumah subsidi di Kota Bekasi atau Kota Bogor kini menembus Rp160 juta, sementara cicilannya tetap harus dibayar dua dekade.

“

Rumah subsidi di Kota Bekasi atau Kota Bogor kini menembus Rp160 juta, sementara cicilannya tetap harus dibayar dua dekade.

”

Rasio pendapatan terhadap harga rumah baginya sudah jauh melampaui garis start. Ia menyimpulkan upaya mengejar kepemilikan rumah akan mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendesak, terlebih seperti seorang sandwich generation seperti dirinya.

Kendala berikutnya terkait kepemilikan rumah ada pada lokasi rumah itu sendiri. Proyek rumah subsidi yang terjangkau sering berjarak dua jam hingga tiga jam perjalanan dari pusat perkantoran. Juan berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Jika dia tinggal di Bogor atau Bekasi, waktunya akan habis di jalan. “Tua di jalan sama juga rugi,” ujarnya.

Ia mengaku pernah mendengar sekilas tentang skema insentif Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Down Payment (DP) Nol Persen via BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak PPN yang ditanggung pemerintah. Informasi itu muncul di media sosial dan grup chat kantor, lalu menghilang begitu saja. Hingga kini Juan belum mengetahui betul detail program yang dirancang membantu masyarakat memiliki rumah itu.

“Belum tertarik ngecek detailnya,” ia berterus terang. Skema subsidi terasa jauh dari realitas sehari-harinya, sebab kondisi finansial mengharuskannya meletakkan hal lain sebagai prioritas.



Photo by Parker Coffman / Unsplash

Belum lagi jika bicara durasi cicilan dari program-program itu. Pelunasan cicilan sampai 20 tahun rasa-rasanya terlalu lama bagi Juan, ditambah adanya risiko bunga yang floating dan kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini.

Dia juga memikirkan skenario terburuk, seperti kehilangan pekerjaan atau tanggungan keluarga bertambah. Tanpa jaring pengaman, mencicil rumah meski dengan adanya bantuan dari pemerintah, menurut Juan, ibarat berlari maraton tanpa garis finish yang jelas.

Sebagai tulang punggung keluarga, ia tidak punya kemewahan gagal bayar. “Kami adalah safety net kami sendiri,” katanya, menggambarkan posisi generasi yang menopang orang

tua dan adik sekaligus.

Setiap keputusan finansial harus menjaga keseimbangan rapuh itu. Rumah, dalam perhitungan Juan, belum memberi nilai tambah setara risikonya.

Pada akhirnya, daripada memiliki rumah sendiri, menyewa rumah bagi Juan terasa lebih masuk akal. Dia tidak perlu memikirkan pajak bumi bangunan, perbaikan atap bocor, atau ongkos izin renovasi.

Katakanlah jika pemilik properti mendadak menaikkan harga sewa, Juan mengatakan masih bisa pindah ke tempat lain tanpa beban penalti bank. Fleksibilitas ini lebih cocok untuknya sebagai sandwich generation.

Generasi Z dan rumah subsidi

Generasi muda seperti Juan, kini, memang dihadapkan pada pilihan sulit dalam memenuhi kebutuhan primer seperti rumah. Di satu sisi profesionalitas sekarang bisa ditopang melalui teknologi. Namun mereka juga dibayang-bayangi ketidakpastian. Konsep mapan, dalam hal ini terkait punya tempat tinggal yang layak memang masih jauh panggang dari api.

Maka tak aneh bila akhirnya generasi angkatan kerja paling muda saat ini, seperti Generasi Z adalah kelompok umur yang paling banyak menggunakan insentif pemerintah dalam program kepemilikan rumah. Menurut data Badan Pengelola

Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Generasi Z atau Gen Z kini mendominasi pembelian rumah subsidi sepanjang tahun 2024. Total unit yang dibeli mencapai 124.889 unit.

Kepala Divisi Sekretariat Komunikasi BP Tapera, Alfian Arif, menjelaskan, dominasi Generasi Z dalam pembelian rumah subsidi berdasarkan data penyaluran rumah melalui skema FLPP. Bila diperinci, sepanjang tahun 2024 realisasi penyaluran FLPP untuk segmentasi Gen Z – yakni mereka yang lahir pada periode 1997–2012 atau berusia 19 tahun–30 tahun – mencapai 124.889 unit, setara dengan 62,35%.



Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kedua kanan) bersama Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setyawan (kanan) menyaksikan penandatanganan akad KPR Sejahtera FLPP BNI di Jakarta, Rabu (23/7/2025). Melalui kerja sama tersebut BNI diberikan kepercayaan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 25.000 unit pada tahun 2025 dalam rangka menyukseskan program tiga juta rumah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Angka tersebut menunjukkan bahwa Gen Z menjadi konsumen terbesar rumah subsidi selama tahun 2024. Adapun total penyaluran FLPP sepanjang tahun lalu mencapai 200.300 unit. “Ini artinya, FLPP menjadi solusi bagi Gen Z untuk memiliki rumah,” jelasnya.

Secara detail, penyaluran FLPP kepada konsumen berusia 19 tahun–25 tahun mencapai 66.746 unit (33,32%), sedangkan untuk usia 26

tahun–30 tahun tercatat 58.143 unit rumah (29,03%).

Data BP Tapera juga menunjukkan bahwa penyaluran rumah subsidi kepada kelompok usia lainnya, lebih rendah. Konsumen berusia 31 tahun–35 tahun tercatat sebanyak 33.916 unit (16,93%), usia 36 tahun–40 tahun sebanyak 20.687 unit (10,33%), dan konsumen di atas 40 tahun sebanyak 20.808 unit (10,39%).

Generasi berpenghasilan tanggung

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Bambang Ekajaya, menilai kebijakan insentif perumahan 2025 belum sepenuhnya menjawab kebutuhan Gen Z di Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, Gen Z sebagian besar tergolong masyarakat berpenghasilan tanggung atau MBT, yang justru tidak mendapat dukungan memadai.

“Gen Z yang masuk MBT langsung kena bunga komersial—bisa 12 persen—jadi beban angsurannya berat,” ujar Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini. Sementara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah jelas mendapat bunga 5%, bebas PPN, dan bebas BPHTB.

Ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini ada program PPN ditanggung pemerintah hingga akhir tahun, pelaksanaannya terkendala ketersediaan unit siap huni.

Menurutnya, saat ini hanya sebagian pengembang yang memiliki rumah ready to use dalam waktu lima bulan ke depan. Di sisi lain, Gen Z yang tidak masuk kategori MBR harus menanggung beban balik nama dan bunga tinggi.

Pemerintah memang menaikkan batas penghasilan MBR menjadi

sekitar Rp14 juta per bulan. Namun, bagi Gen Z yang penghasilannya sedikit di atas itu, semua fasilitas langsung hilang.

Kelompok ini akhirnya harus masuk ke skema kredit komersial penuh, meski kontribusinya terhadap ekonomi digital sangat besar. Bambang mengusulkan subsidi parsial untuk MBT, misalnya menanggung separuh dari besaran bunga.

“

Kelompok ini akhirnya harus masuk ke skema kredit komersial penuh, meski kontribusinya terhadap ekonomi digital sangat besar.

”

Bagi Gen Z yang penghasilannya masih masuk kategori MBR, masalah utamanya bukan soal bunga, melainkan lokasi rumah. Rumah subsidi umumnya berada jauh dari pusat kota dan tempat kerja. Bambang menilai solusi itu bisa ditemukan melalui konsep rusunami. Sayangnya, menurutnya rusunami sulit dijalankan dalam skema FLPP.

Menurutnya, proyek rusunami tidak menarik bagi pengembang karena biaya konstruksinya lebih tinggi daripada harga jual yang ditetapkan. REI sedang mengupayakan satu proyek rusunami sebagai simulasi harga dan konsep.

Bambang belum mau menyebutkan lokasi dan pengembangnya, tapi

dia berharap pemerintah bersedia mempertimbangkannya. Rusunami dinilai sebagai solusi paling cocok bagi Gen Z.

Selain itu, pembangunan rumah bersubsidi akan semakin unggul jika menggunakan konsep transit oriented development (TOD), yang memadukan hunian dengan akses transportasi publik seperti KRL, MRT, dan LRT. Lokasinya berada di tengah kota dan dikelilingi fasilitas lengkap. “Orang bisa mobile dengan cepat dan murah,” kata Bambang.

Ia menegaskan konsep ini harus diprioritaskan agar target pembangunan tiga juta rumah bisa dicapai.

Menunggu masuknya investasi asing

Pemerintah sebenarnya sudah mendorong penjualan rumah murah melalui berbagai skema. Salah satunya FLPP. Namun FLPP saat ini baru menyasar pembangunan 350.000 unit per tahun. Padahal, target hunian baru nasional mencapai satu juta unit per tahun.

Sisanya berupa renovasi dan pembangunan rumah desa yang digarap koperasi. Skema non-FLPP hanya menambah sekitar 150.000 unit, sehingga total pasokan baru masih jauh dari target.

Kekurangan pasokan hunian ini, menurut Bambang, akan berdampak pada peningkatan backlog perumahan. Saat ini backlog mencapai 15 juta unit, dan trennya meningkat tiap tahun. Solusi vertikal seperti rusunami dianggap penting untuk menutup kekurangan.

REI sempat menyambut baik rencana bantuan luar negeri yang menargetkan pembangunan satu juta hunian vertikal. Namun hingga kini, rencana itu masih berbentuk konsep. “Sampai sekarang belum terdengar lagi,” katanya.



Warga menjemur pakaian di Rumah Susun Bidara Cina, Jakarta, Senin (28/7/2025). Kementerian Perumahan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh dan pembangunan hunian vertikal baik berupa sewa maupun milik. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

Ia mengkhawatirkan program semacam itu akan berakhir begitu saja tanpa tindak lanjut.

Bambang juga menyoroti peran Kementerian PKP yang masih lambat beradaptasi pasca dipisahkan fungsinya dari Kementerian PUPR. Fokus kebijakan dinilai tidak tepat

sasaran. Ia mengkritik munculnya wacana “bulog perumahan” dari Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP, yang dianggap menyederhanakan persoalan. “Padahal rumah tidak sama dengan beras,” ujarnya.

Masalah lain yang mengganggu sektor ini adalah isu pertanahan,

khususnya pengambilalihan tanah terlantar. Tidak adanya batasan yang jelas justru menimbulkan kepanikan di kalangan pengusaha.

Bambang menilai semua persoalan ini membuat energi sektor perumahan terpecah. Ia menyarankan agar kementerian fokus pada pencapaian target rumah baru, termasuk bagi Gen Z.

Terkait penambahan kuota FLPP, Bambang menilai pasar masih mampu menyerap hingga mendekati 400.000 unit. Namun, tantangannya ada pada pendanaan yang tidak selalu siap. “Kalau pendanaan siap, market dan developer tidak ada masalah,” ujarnya.

Ia kembali menekankan bahwa bagi Gen Z, solusi yang paling realistis adalah hunian vertikal dengan subsidi parsial. Kelompok MBT yang berpenghasilan sampai Rp25 juta sebaiknya mendapat bantuan bunga. Skema lain yang bisa didorong adalah penurunan BPHTB dari 5% ke 2,5%. Kombinasi dengan PPN DTP akan memberi insentif total sebesar 12,5%.

REI juga berencana mendorong Provinsi DKI Jakarta menurunkan tarif BPHTB agar menjadi contoh bagi daerah lain. Kewenangan pengaturan BPHTB berada di tingkat provinsi. Jika Jakarta memulai, provinsi lain diharapkan mengikuti. Langkah ini bisa membuat hunian di perkotaan lebih terjangkau.

Penurunan tingkat bunga komersial

Menurut Bambang, masih banyak Gen Z yang belum memprioritaskan kepemilikan rumah karena berbagai kekhawatiran. Mereka khawatir dengan bunga floating, tenor panjang, dan lokasi rumah yang jauh.

Ia menekankan pentingnya edukasi bahwa rumah adalah aset jangka panjang. “Rumah bisa jadi tabungan melawan inflasi,” katanya.

Ia menyebut rumah subsidi 20 tahun lalu hanya bernilai Rp10 juta, tapi kini mencapai Rp170 juta. Kenaikan nilai yang signifikan menunjukkan bahwa rumah bisa menjadi investasi. Bagi Gen Z, ini bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Edukasi tentang manfaat jangka panjang rumah harus diperkuat.

Untuk mengatasi hambatan, REI mengusulkan agar pemerintah menurunkan bunga komersial

bagi MBT. Jika bunga turun sedikit saja, rumah seharga Rp500 juta di lokasi strategis bisa terserap. Developer kelas menengah akan lebih aktif berkontribusi jika skema ini dijalankan. Subsidi parsial bisa jadi jembatan efektif antara MBR dan kelas menengah.

Solusi jangka panjang, Bambang mengusulkan, adalah memperkuat Komite Perumahan Rakyat yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo. Komite ini melibatkan REI, perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia percaya koordinasi lintas sektor di dalam komite akan memperlancar izin, pendanaan, pemasaran, hingga alokasi subsidi. “Komite dapat mengoordinasikan semua,” ujarnya.

Di sisi lain, dengan perkembangan penyaluran perumahan yang belum ada data resminya, maka pemerintah perlu lebih transparan terkait kebijakan ini. Bahkan Kepala Ekonom BCA David Sumual menuturkan, pemerintah perlu memikirkan secara komprehensif apakah target pembangunan 3 juta unit rumah tersebut masih realistis atau tidak.

Karena kebijakan ini harus terarah dan didasarkan pada sisi demand dan supply. Berdasarkan kondisi saat ini, demand untuk kredit perumahan khususnya rumah bersubsidi terus meningkat.

Kenaikan demand ini tidak terlepas dari insentif pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Bahkan ada beberapa bank yang fasilitas penyaluran kredit perumahannya didominasi oleh FLPP,” ujar David Sumual kepada SUAR.

Ia memaparkan, sebagian besar profil pencari rumah masih didominasi generasi milenial, karena secara penghasilan, mereka mampu mencicil rumah. Sedangkan Generasi Z kebanyakan masih suka bersenang-senang dan belum ada target untuk membeli sebuah hunian.

“

Sebagian besar profil pencari rumah masih didominasi generasi milenial, karena secara penghasilan, mereka mampu mencicil rumah. Sedangkan Generasi Z kebanyakan masih suka bersenang-senang

”

Sedangkan pengamat properti yang juga menjabat sebagai Head of Research Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) Indonesia, Anton Sitorus, menilai, minat Gen Z untuk memiliki hunian sangat rendah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia.

Ia juga juga sependapat jika kebanyakan Gen Z lebih memprioritaskan gadget, liburan, dan

fashion daripada membeli rumah. Faktor utama yang menyebabkan kurangnya minat Gen Z untuk membeli rumah adalah minimnya penghasilan.

Ada beberapa Gen Z yang mempunyai ketertarikan membeli rumah karena dukungan finansial dari keluarga atau penghasilan yang sudah di atas UMR.

Terobosan pemerintah

Masih minimnya penetrasi distribusi perumahan, khususnya ke Gen Z ini mendorong pemerintah melakukan terobosan. Salah satunya, pada September nanti, Kementerian Perumahan dan Permukiman Wilayah akan kembali meluncurkan 25.000 rumah subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan profesi khusus.

Berbagai segmen profesi khusus

yang akan mendapat prioritas itu, seperti petani, nelayan, buruh, wartawan, tenaga kesehatan, hingga kalangan masyarakat lainnya. “Nanti anybody [siapa saja yang bisa memiliki]. Jadi kita akan membuat masif, karena program ini sangat bermanfaat bagi rakyat, DP-nya 1% kemudian 5% lainnya disubsidi,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Skema pembiayaan rumah subsidi menggunakan suku bunga sebesar 5%, jauh lebih rendah dibandingkan skema rumah komersial yang mencapai 12%. Hal ini diklaim menjadi satu terobosan yang menarik dan banyak peminat.

Peluncuran 25.000 rumah subsidi ini merupakan bagian dari program peningkatan kuota rumah subsidi nasional. Di mana, tahun 2025 ini melalui melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

ditargetkan penawaran rumah subsidi mencapai 350.000 unit. Jumlah ini naik dari kisaran 200.000 unit pada tahun sebelumnya.

Terobosan lain yang juga dilakukan adalah pengguliran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan. Anggaran program ini di bantu langsung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara – yang berkomitmen menggelontorkan Rp130 triliun melalui pembiayaan KUR bidang perumahan.



Warga menjemur pakaian di Rumah Susun Bidara Cina, Jakarta, Senin (28/7/2025). Kementerian Perumahan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh dan pembangunan hunian vertikal baik berupa sewa maupun milik. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

Skema penyaluran KUR Perumahan nantinya berjalan dalam dua jalur. Dari sisi penawaran perumahan, yang akan terkait dengan para pengembang serta ekosistem perumahan guna menghasilkan rumah berkualitas serta layak huni, dengan plafon anggaran mencapai Rp177 triliun.

Sisi sebaliknya adalah sisi permintaan dengan anggaran Rp13 triliun yang akan terhubung dengan masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di sektor perumahan, seperti membangun ruko maupun homestay, sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.